

Protes Sosial Emha Ainun Nadjib Terhadap Kebijakan Berjilbab 1982-1991

Linda Pratiwi

Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : lindapратиwi137@gmail.com

Abstrack

This research discusses the social protest done by Emha Ainun Nadjib against the hijab policy in 1982-1991. The wearing of the headscarf in 1982-1991 was considered a physical manifestation of the Islamic political movement that was against the New Order government. Emha Ainun Nadjib is one of the figures who participated in voicing the anxiety experienced by schoolgirls and Muslim women in Indonesia. Emha Ainun Nadjib attracted the attention of the Indonesian people with his work, which became a study of every idea of thought and criticism from various aspects of the New Order government's policies that were considered detrimental to the people. The purpose of this research is to find out how the wearing of jilbab in 1982-1991 and explain Emha Ainun Nadjib's social protest against the policy of jilbab and how the impact arises after the social protest. This research uses historical research method which is divided into four stages including heuristics, verification, interpretation, and historiography. The result of this research is first, the issuance of decree No. 052 in 1982-1991 caused various oppositions not only from the students but also the community, especially Muslim women. Second, the drama Lautan Jilbab performed by Emha Ainun Nadjib as a form of protest against the headscarf policy in 1982-1991. Third, the drama performance of Lautan Jilbab shows that drama, apart from being an art, can also be used as a medium for da'wah.

Keywords: Social Protest, Emha Ainun Nadjib, Headscarf Policy

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang protes sosial yang dilakukan oleh Emha Ainun Nadjib terhadap kebijakan berjilbab di tahun 1982-1991. Pemakaian jilbab di tahun 1982-1991 dianggap sebagai wujud fisik dari gerakan politik Islam yang bertentangan dengan pemerintah Orde Baru. Emha Ainun Nadjib merupakan salah satu tokoh yang ikut serta dalam menyuarakan kegelisahan yang dialami oleh para siswi di sekolah dan wanita Muslimah di Indonesia. Emha Ainun Nadjib menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan karyanya yang menjadi kajian setiap gagasan pemikiran maupun kritik dari berbagai aspek terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap merugikan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemakaian jilbab di tahun 1982-1991 dan memaparkan protes sosial Emha Ainun Nadjib terhadap kebijakan berjilbab serta bagaimana dampak yang timbul setelah adanya protes sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terbagi menjadi empat tahap meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini pertama, keluarnya SK No. 052 di tahun 1982-1991 menimbulkan berbagai pertentangan tidak hanya dari kalangan siswi saja tetapi juga masyarakat terutama wanita Muslimah. Kedua, pementasan drama Lautan Jilbab yang dilakukan oleh Emha Ainun Nadjib sebagai bentuk protes terhadap kebijakan berjilbab di tahun 1982-1991. Ketiga, pertunjukan drama Lautan Jilbab menunjukkan bahwa drama selain sebagai seni juga dapat dijadikan sebagai media dakwah.

Kata Kunci: Protes Sosial, Emha Ainun Nadjib, Kebijakan Berjilbab

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Orde Lama runtuh pada tahun 1966 ketika Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Soeharto. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai pada tahun 1966 dibawah kekuasaan Soeharto. Pada masa pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru Negara Indonesia mengalami masa yang tidak stabil. Pada masa ini kebijakan pemerintah Orde Baru berorientasi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. (lan L.Betts, 2006) Akan tetapi, hal ini justru memberikan dampak buruk kepada Umat Islam yang dipandang oleh pemerintah Orde Baru sebagai ancaman terhadap kemajuan politik. Hal inilah yang menjadi penyebab pemerintah Orde Baru menerapkan sejumlah strategi untuk membatasi pergerakan Umat Islam. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai seragam sekolah secara nasional.

Munculnya SK No. 052 di tahun 1982 berisi aturan tentang seragam sekolah secara nasional yang diterapkan di Sekolah Negeri secara tidak langsung menyatakan adanya larangan berjilbab yang kemudian memicu reaksi keras dari masyarakat terutama dari kalangan siswi yang memakai jilbab ke sekolah dan juga para wanita Muslimah. Kebijakan ini sangat keras mengancam siswi, banyak dari mereka yang diancam akan dikeluarkan

dari sekolah jika tetap memakai jilbab ke sekolah. Disisi lain, peraturan pemerintah terhadap kebijakan berjilbab seakan menjadi kabar baik untuk Gerakan Fenimisme Anti Jilbab. Bahkan gerakan ini terus menyebarluas di masyarakat Indonesia hingga tahun 1989 dengan narasi '*Jilbab Beracun*'. Gerakan ini menyebarkan kabar buruk bahwa orang yang berjilbab adalah orang yang berbahaya. Propaganda ini membuat perempuan berjilbab merasa takut untuk memakai jilbab di tempat umum. (Jo, 2018)

Sebagai seorang budayawan, Emha Ainun juga ikut merasakan kegelisahan dan ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap kebijakan berjilbab. Melalui puisinya yang berjudul '*Lautan Jilbab*', ia menjadi salah satu yang aktif dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan ini. Karyanya menyimbolkan perlawanan terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah sekaligus mengangkat isu jilbab sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia. Pementasan drama Lautan Jilbab di berbagai kota berhasil menggerakkan opini publik, menginspirasi gerakan solidaritas di kalangan wanita Muslimah dan menarik perhatian pemerintah yang berusaha membatasi ruang ekspresi tersebut. Melalui seni, Emha Ainun mengubah perdebatan jilbab dari sekedar masalah agama menjadi isu yang lebih luas tentang kebebasan dan keadilan. (Titian.id, 2024)

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana protes sosial yang dilakukan Emha Ainun Nadjib terhadap

kebijakan berjilbab tahun 1982-1991. Batasan temporal yang dipilih penulis yaitu dengan diawali tahun 1982 dan diakhiri tahun 1991. Tahun 1982 dijadikan batas awal penelitian dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah Orde Baru mengeluarkan SK No.052/C/Kep/D/1982 yang mulai diterapkan di Sekolah Negeri. Tahun 1991 menjadi batas akhir dalam penelitian ini karena pada tahun tersebut pemerintah Orde Baru kembali memperbolehkan pemakaian jilbab dengan dikeluarkannya SK No. 100/C/Kep/D/1991.

Penulis mengakui bahwa telah banyak penelitian terkait kebijakan berjilbab masa Orde Baru, bahkan penelitian ini juga berangkat dari penelitian terdahulu. Namun, dari banyaknya literatur review yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang fokus kajiannya mengenai Protes sosial yang dilakukan Emha Ainun Nadjib terhadap kebijakan berjilbab 1982-1991. Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai protes sosial yang dilakukan oleh Emha Ainun Nadjib dengan karyanya yang berjudul Lautan Jilbab dan dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, Kuntowijoyo mengemukakan ada empat tahap dalam metode penelitian sejarah diantaranya yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 2013) Tahap heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan sumber dalam penelitian ini berupa asrip, dokumen, naskah, dan surat

kabar yang diterbitkan pada tahun tersebut. Dalam tahap ini penulis menemukan sumber primer berupa salinan SK No. 052/C/Kep/D/1982 dan SK No. 100/C/Kep/D/1991, selain itu penulis juga menemukan beberapa majalah yang diterbitkan pada waktu itu seperti Majalah Tempo, Majalah Editor, Majalah Kompas dan Majalah Media Dakwah yang penulis temukan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penulis juga menemukan Syair Lautan Jilbab cetakan pertama tahun 1989 dan beberapa sumber sekunder lainnya yang berupa buku-buku karya Emha Ainun yang penulis temukan di Perpustakaan EAN Yogyakarta.

Langkah selanjutnya adalah verifikasi kredibilitas sumber, seorang peneliti harus jeli untuk menilai semua sumber yang telah diperoleh. Analisis terhadap data-data yang berhasil diverifikasi merupakan usaha dari peneliti untuk menyusun data-data tersebut dan menafsirkannya. Analisis sejarah juga bisa dimaksud dengan sintesis dari data yang telah diperoleh yang kemudian akan dilanjutkan pada tahap historiografi. Historiografi yaitu cara menulis, menyajikan atau pelaporan temuan penelitian sejarah yang dilakukan.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang secara khusus mengkaji sebuah sejarah sosial politik. Penelitian ini mengkaji tentang protes sosial Emha Ainun Nadjib terhadap kebijakan berjilbab 1982-1991. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan politik. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menelusuri fakta-fakta sejarah terkait akar permasalahan yang mendasari Emha Ainun Nadjib melakukan

protes sosial terhadap pemerintahan Orde Baru serta untuk melihat reaksi masyarakat pasca keluarnya SK No. 052. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa protes sosial merupakan refleksi dari ketidakpuasan terhadap struktur sosial dan distribusi kekuasaan yang ada pada masa Orde Baru. (Anthony Giddens, 2010) Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait SK. No. 052 dan SK No. 100 secara mendalam yang mencakup pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan, motif dibalik kebijakan tersebut, dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. (Miriam Budihardjo, 2008)

Dalam penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dari Mayer Zald dan Michel Belanger. Gerakan sosial merupakan aktivitas kelompok yang terkoordinasi secara longgar dan tidak memiliki mekanisme formal untuk mewujudkan perubahan sosial. Gerakan sosial menurut Mayer Zald dan Michel Belanger adalah cara masyarakat untuk menyuarakan keluhan dan ketidakpuasan mereka serta mendorong atau menghambat perubahan. Gerakan sosio-kultural merupakan jenis gerakan sosial yang relevan dengan penelitian ini. Gerakan sosio-kultural biasanya berfokus pada aspek-aspek kehidupan sosial yang kurang teraba dan mengusulkan perubahan norma, nilai, simbol, kepercayaan, dan pola hidup sehari-hari. (Sztompka, 2008)

B. PEMBAHASAN

1. Pemakaian Jilbab Di Indonesia 1982-1991

Pada tahun 1970an pemakaian jilbab di Indonesia masih kurang familiar di kalangan wanita Muslimah, dikarenakan mereka menganggap jilbab hanya sebatas pakaian ibadah bagi perempuan. Akan tetapi, di tahun 1979 terjadi Revolusi Iran dimana pada saat itu perempuan Iran diwajibkan untuk memakai jilbab yang kemudian memberikan pengaruh cukup besar pada Gerakan Islam dalam maraknya pemakaian jilbab di Indonesia. (Zuarnum, 2022) Dari sinilah kemudian jilbab mulai populer dan melahirkan Muslimah Indonesia yang mulai memakai jilbab baik dari kalangan orang tua, orang dewasa, hingga anak-anak. Sehingga pada masa ini sering disebut dengan '*Demam Jilbab*'.

Popularitas jilbab di Indonesia juga didorong oleh Gerakan Dakwah Islam yang diselenggarakan oleh beberapa Lembaga Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi. Muhammad Imadadun mengembangkan Pelatihan Dakwah Mujahidin di Institut Teknologi Bandung yang memberikan dampak cukup signifikan. (M. Imadadun Rahmat, 2005) Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan jaringan mahasiswa Islam yang luas dan meningkatkan dakwah Islam di kampus dengan membentuk program pengembangan kaderisasi. Selain itu, ada juga Gerakan Dakwah Islam lainnya seperti Studi Islam Inspiratif yang pertama kali dipelopori oleh Remaja Karisma (Keluarga Remaja Islam) di Masjid Salman ITB. Gerakan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan pendidikan agama pemuda. (Moeflich Hasbullah, 2017)

Maraknya pemakaian jilbab di Indonesia justru dipandang sebagai representasi nyata perlawanan gerakan

politik Islam terhadap rezim Orde Baru. Hal ini dikarenakan pada tahun 1982-1985 hubungan Islam dengan pemerintah memasuki resiprokal-kritis. Pada masa ini negara mulai melihat populasi Muslim yang merupakan mayoritas negara ini sebagai ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Namun, Islam mulai menempatkan Negara Indonesia dalam posisi tidak konfrontatif. (Abdul Aziz Thaba, 1996) Pemerintah Orde Baru berusaha untuk membatasi ruang gerak Islam. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pada tanggal 17 Maret 1982 Presiden Soeharto meminta kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Dr. Daoed Joesoef untuk mengeluarkan SK No. 052/C/Kep/D/1982 yang ditanda tangani oleh Prof. Darji Darmodihardjo S.H. Surat Keputusan ini memuat sepuluh bab dan enam belas pasal yang berisi tentang "Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982)

Keluarnya SK No. 052 justru menghiasai pemerintah Orde Baru dengan berbagai pertentangan dari kalangan siswi dan wanita Muslimah. Pada 15 Januari 1983 persoalan mengenai jilbab semakin rumit dan meluas, hal ini terjadi karena para siswi berbusana Muslimah di Sekolah Negeri di kawasan Jakarta, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung DPRD. Mereka menuntut agar tidak ada paksaan untuk

melepaskan jilbabnya dan tetap dapat mengikuti pelajaran sekolah dengan tenang. Ternyata kebijakan yang diambil oleh para Kepala Sekolah tidaklah sama misalnya SMA N 36 dan SMA N 48 menskors siswinya yang berjilbab ke sekolah. Tetapi rekannya di SMA N SMA N 2, SMA N 8, SMA N 14, SMA N 17, dan SMP N 22 dan SMP N 55 mengizinkan pelajar berpakaian Muslimah untuk dapat dengan tenang mengikuti pelajaran di sekolah. (Majalah Media Dakwah, 1985)

Pada tahun 1980-1985 ada banyak kasus pelanggaran jilbab yang terjadi di sekolah, pada masa ini banyak siswi yang terpaksa keluar dari sekolah masing-masing. Pemerintah Orde Baru saat itu masih memandang pemakaian jilbab yang populer sebagai ancaman, meskipun para siswi telah berupaya untuk membela hak-hak mereka. Oleh karena itu, banyak Sekolah Negeri di Indonesia yang berlomba-lomba menyapu bersih jilbab di kalangan siswi. Kontroversi terkait pemakaian jilbab muncul kembali pada tahun 1988-1989 dan semakin intens karena mendapat perhatian dari media dan publik. Pada masa ini siswi lebih berani untuk memperjuangkan hak mereka sampai ke pengadilan. (Nuraeni & Gumilar, 2021)

Salah satu kasus yang terjadi pada bulan Oktober 1988 di SMA N 1 Bogor, empat orang siswi berjilbab menuntut ganti rugi senilai 100 juta kepada Kepala Sekolah. Mereka mendapat perlakuan diskriminatif seperti ditegur oleh Kepala Sekolah, tidak diberi nilai, dan dianggap tidak hadir sehingga memicu keresahan antara siswi dan orang tua. Setelah banyak pertimbangan, mereka berusaha membawa kasus ini ke pengadilan. Mereka

membawa persoalan ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nursyahbani Katjasungkana yang menggugat pemerintah, Kanwil, Dikbud Bogor, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan Kepala Sekolah SMA N 1 Bogor. Perjuangan mereka dijalur hukum membuahkan hasil dan menang dalam persidangan.

Tindakan serupa juga dilakukan pada tahun 1989 di SMA N 68 Jakarta, dimana pada waktu itu sepuluh siswi dipulangkan dari sekolah karena berjilbab. Akibat persoalan ini Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menggugat agar keputusan sekolah mengeluarkan siswi dihapuskan. Namun, hasil kasus ini berbeda dengan SMA N 1 Bogor, gugatan mereka di tolak di pengadilan tingkat akhir. (Majalah Tempo, 1991b) Selain beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut beberapa kasus pelanggaran berjilbab yang terjadi di tingkat Sekolah Menengah Atas sebagai berikut:

Table 1: Kasus-Kasus Berjilbab Tingkat Sekolah Menengah Atas

No	Kota	Tahun	Jumlah Siswa
1	Jakarta	1981-1989	75
2	Bandung	1979-1984	92
3	Bekasi	1990	26
4	Bogor	1988	7
5	Cirebon	1983-1989	6
6	Tegal	1991	-
7	Kendari	1988	-

8	Sulawesi Utara	1988	-
9	Purwokerto	1991	1
10	Kabanjahe Tanah Karo	1991	1
11	Surabaya	1989-1991	16
12	Surakarta	1983	1
13.	Jember	1982	1

Keterangan: Data Pelanggaran Berjilbab Tingkat SMA Di Indonesia

Sumber: "Karena Jilbab Di Balik Larangan Bejilbab Di Sekolah Negeri Di Indonesia 1982-1991" (Alatas, 2021)

Dari data diatas menunjukkan bahwa diperkirakan kasus pelanggaran berjilbab di SMA saat itu telah mengancam kurang lebih 350 siswi yang beberapa diantara mereka mendapat sanksi yang cukup berat seperti diskorsing, tidak diberi soal ujian bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Meskipun para siswi telah berupaya menyampaikan keluh kesah mereka kepada Gubernur, anggota DPRD, Ulama, dan tokoh masyarakat setempat namun belum membuahkan hasil yang positif. Kesiadaan beberapa SMA di Kota Bandung untuk menerima para siswi tersebut jika mereka dikeluarkan dari sekolah dapat memberikan sedikit kelegaan. Salah satu sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Persatuan Guru Islam Indonesia (PGII) yang dikelola oleh K.H E.Z. Muttaqiem ketua Majelis Ulama Jawa Barat yang aktif mendukung sisiwi berjilbab. (Alatas, 2021)

Banyaknya tekanan yang diterima siswi berjilbab di sekolah belum menghilangkan rasa sakit hati Umat Islam.

Kemudian penghujung tahun 1989 terjadi peristiwa yang menghebohkan. Maraknya kontroversi ini kemudian memunculkan propaganda '*Jilbab Beracun*' sehingga kasus jilbab semakin mendapat perhatian Nasional. Tidak hanya siswi berjilbab yang mendapat perlakuan diskriminatif di sekolah, tetapi juga para Muslimah yang kala itu beredar isu bahwa pengedar racun di pasar-pasar dan makanan itu adalah para wanita berjilbab. (Majalah Editor, 1989) Adanya isu-isu diatas membuat para wanita berjilbab merasa terancam dan sebagian dari mereka akhirnya menyerah untuk melepaskan jilbabnya. Disamping itu beredar di media massa yang meliputi kejadian di Pasar Lawu, seorang perempuan berjilbab bernama Ny. Fadillah diduga menaruh racun di tempat seorang pedagang sehingga ia mendapat ancaman dari masyarakat yang merajamnya hingga hampir meninggal dunia. (Alatas, 2021)

2. Lautan Jilbab Sebagai Bentuk Protes Emha Ainun Nadjid

Muhammad Ainun Nadjib atau yang lebih populer disapa Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun lahir pada tanggal 27 Mei 1953 di Jombang, Jawa Timur. Emha Ainun adalah anak keempat dari lima belas bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Abdul Latief dan Chalimah. Muhammad disingkat M.H yang pada akhirnya menjadi Emha. Kedua orang tuanya merupakan tokoh yang sangat penting di desanya, karena banyak warga yang senang sekali datang kepadanya untuk mengadukan berbagai permasalahan hidup sehari-hari. Dari hal tersebut lahirlah dari diri Emha Ainun yang sangat peduli dengan penderitaan

atau kesusahan dari kalangan masyarakat rendah. Kedua orang tuanya merupakan teladan bagi kehidupan Emha Ainun selanjutnya yang melahirkan pemikiran kritis terhadap keadilan. Emha Ainun menghabiskan masa kecilnya di Desa Mentro, Jombang, Jawa Timur. Dari sinilah Emha Ainun mulai memasuki dunia, mengembangkan gagasan sosial, intelektual, kultural, dan spiritual. (lan L.Betts, 2006)

Pada masa Orde Baru, Emha Ainun merupakan seorang seniman, penulis, budayawan, dan pemikiran Islam yang cukup vokal dalam menyuarakan kritik sosial. Karya-karyanya yang mengkaji setiap gagasan dan kritik dari berbagai aspek yang mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia pada waktu itu. Emha Ainun kerap mengeluhkan beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat. Seperti halnya kebijakan berjilbab di tahun 1982-1991. Menurut Emha Ainun, setiap perempuan berhak menentukan keinginannya untuk berjilbab atau tidak. Keputusan mengenai otoritas dapat diambil dari berbagai sudut pandang, termasuk kepatuhan budaya dan agama. Dalam hal ini yang diperjuangkan adalah hak setiap orang untuk mengambil keputusan, bukan persoalan larangan berjilbab. (Nadzib, 2023) Karyanya yang berisi kritikan pedas terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru banyak dipublikasikan di berbagai media massa, salah satunya mencakup Islam, Indonesia, dan kebudayaan. Pengaruh kritik pada karya sastra terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru memberikan dampak yang signifikan. Sehingga pada saat itu pembacaan puisi, pementasan

teater, dan peredaran buku sastra di beberapa kota dan provinsi juga dianggap mengganggu stabilitas negara. (Latief S.Nugraha, 2018)

Pada awal tahun 1980an terjadi kebangkitan protes sosial yang dilakukan oleh beberapa budayawan salah satunya Emha Ainun, melalui karya sastra yang pada saat itu menjadi fenomena yang menarik. Teater Dinasti memproduksi sebagian besar karya Emha Ainun yang dibuat pada akhir tahun 1970an. Karya-karya yang dipentaskan antara lain Patung Kekasih 1983, Geger Wong Ngoyak Macan 1984, Keajaiban Lik Par 1984, Mas Dhukun 1986, dan Calon Drs. Mul. Hampir semua karyanya didasarkan pada topik yang waktu itu dibicarakan oleh Komunitas Sastra Yogyakarta dan Nasional. Akan tetapi, pada tahun 1987 Teater Dinasti dibubarkan dan di tahun itu Emha Ainun juga mementaskan drama baru dan sukses besar. Emha Ainun bersama dengan teman-temannya dari Universitas Gadjah Mada (Jama'ah Shalahuddin) menyelenggarakan pementasan drama, ia membawakan karyanya yang berjudul Lautan Jilbab, Sunan Sableng, dan Baginda Faruk. (Ian L.Betts, 2006)

Emha Ainun berjuang bersama masyarakat dengan menghadirkan 1000 pemain teater dari berbagai kota di Indonesia. Saat itu, Taufiq Ismail meminta Emha Ainun yang baru tiba dari Belanda untuk membawakan karyanya yang berjudul Lautan Jilbab. (Rosyidi, 2021) Puisi itu awalnya hanyalah puisi yang Emha Ainun ciptakan secara spontan saat acara Ramadhan on Campus pada 16 Mei 1987 yang diselenggarakan oleh Jama'ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada. Saat itu Emha Ainun naik panggung untuk

membawakan puisinya diawal acara, ia terkejut dengan respon yang luar biasa dari penonton hingga menerima audiens sebanyak kurang lebih 6000 penonton. (Pratama, 2019) Pementasan drama Lautan Jilbab karya Emha Ainun disutradarai oleh Agung Waskito dengan supervise Dr. Kuntowijoyo. Karena antusias yang tinggi, drama ini kemudian dipentaskan di banyak kota di Indonesia selain Yogyakarta yaitu Madiun, Malang, Surabaya, Bandung, Jember, dan Makassar. "Judulnya sengaja di buat Lautan Jilbab, agar heboh dan gemanya ke seluruh negeri padahal yang ikut cuma beberapa tetapi pementasannya diselenggarakan di berbagai tempat" ujar Emha Ainun. (Nadzib, 2023)

Pada tahun 1989 kumpulan puisi Lautan Jilbab direvisi dari satu judul menjadi 33 sub judul yang kemudian disusun dalam buku Syair Lautan Jilbab. (Nadzib, 2023) Isi yang terkandung dalam puisi Lautan Jilbab yaitu mengkritisi keadilan pemerintah Orde Baru terhadap rakyat. Fenomena puisi Lautan Jilbab pada waktu itu juga dianggap sebagai bentuk perlawanan fisik terhadap pemerintah Orde Baru, karena percakapan yang terkandung dalam puisi Lautan Jilbab mencerminkan situasi yang terjadi pada waktu itu seperti kasus larangan berjilbab. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Menurut sejumlah media cetak, pementasan Lautan Jilbab di Stadion Wilis Madiun di hadiri oleh penonton mencapai 35.000 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang fantastis untuk sebuah produksi teater pada saat itu. Koran Jawa Pos yang terbit pada tanggal 23 Juli 1991 dengan tajuk Christine Hakim di Lautan Jilbab: Karya Cak Nun yang digelar di Go

Skate menyebut pertunjukan tersebut sebagai drama kolosal. Pementasan ini mengikutsertakan 70 orang, 40 orang dari Surabaya dan 30 orang dari Yogyakarta. Suporter dari Surabaya sebagian besar bukan berasal dari industri teater. Butuh waktu dua bulan untuk mempersiapkan pementasan drama Lautan Jilbab ini. Harga tiket untuk menonton pertunjukan drama Lautan Jilbab mulai dari 5.000 Sampai 10.000. Saat itu, pembelian tiket dilayani dengan sistem karcis dan pementasan dimulai pada pukul 19.30.(Pos, 1991)



Keterangan: Foto pementasan teater Lautan Jilbab di Gedung Go Skate, Surabaya, Jawa Timur.

Sumber: "Samudra Cinta Kasih" (Majalah Tempo, 1991a)

Pementasan Lautan Jilbab di Gedung Go Skate Surabaya ditangani oleh empat sutradara yaitu Jujuk Prabowo (Teater Gandrik Yogyakarta), Goetheng Ms. Fauzie, Whani H. Darmawan, Agus Sutheng Yuniawan (ketiganya dari Teater Shalahuddin Yogyakarta). Dekorasi yang dipakai dalam pertunjukan mengandung unsur budaya islami seperti kubah, ada pilat empat buah, enam buah beduk, dan menggunakan atribut santri. Kostum yang dipakai laki-laki dengan menggunakan

baju khas daerah Melayu warna hitam dan memakai peci, sedangkan kostum yang dipakai perempuan berupa baju terusan dan jilbab putih (busana Muslimah). Iringan musiknya ditangani oleh Sapto Rahardjo, seorang musisi Yogyakarta. Ia menyajikan berbagai bunyi pengiring yang terdiri dari enam komposisi khusus untuk pementasan Lautan Jilbab ini dengan menggunakan berbagai perangkat seperti RS PCM Keyboard U-20, Synthesizer D-50, Digital Sampling Keyboard Musik Computer S-50. Sebagai pelengkap rangkaian adegan tari pembukaan, ia juga menggunakan lagu dari King Gipsy de La Espanola yang sangat mirip dengan tema musik Timur Tengah. Namun, ia juga memutar kaset penyanyi berbakat Mesir yaitu mendiang Umi Kalsum, Thola'al badru'alaina, yang dinyanyikan warga Madinah saat Rasulullah tiba hijrah dari Mekkah. Hal ini memungkinkan ia untuk melakukan orkestrasi gambus yang benar-benar asli dari Timur Tengah.(Majalah Tempo, 1991)

Puisi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan yang efektif, karena menggabungkan elemen seni dan sastra untuk mengkomunikasikan pesan penting tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Emha Ainun menggunakan kekuatan kata-kata dan simbolisme untuk menyuarakan ketidakpuasan dan mendorong perubahan sosial, menginspirasi banyak orang untuk melawan kebijakan yang tidak adil. Dalam konteks yang lebih luas Lautan Jilbab berkontribusi pada gerakan sosial yang mendukung kebebasan beragama dan hak asasi perempuan di Indonesia. Karya ini menunjukkan bagaimana sastra dapat menjadi alat yang kuat untuk perlawanan

dan perubahan sosial, memberikan suara bagi mereka yang tertindas dan memobilisasikan masyarakat untuk mendukung keadilan dan kebebasan.

3. Dampak Pementasan Lautan Jilbab Di Masyarakat

Sejak diberlakukannya SK No. 052 tahun 1982 membuat siswi merasa terkekang. Sebab hanya sepotong kain penutup kepala bisa membuat mereka dikeluarkan dari sekolah. Karya Emha Ainun yang berjudul Lautan Jilbab kemudian diproses menjadi drama yang dipentaskan di berbagai kota. Tujuan dari pementasan drama ini adalah untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya jilbab bagi perempuan Muslimah dan juga untuk merespon fenomena kebijakan berjilbab pada waktu itu. Pementasan Lautan Jilbab mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya berjilbab. Jilbab bukanlah sekedar penutup kepala atau sebagai pelengkap kecantikan tapi lebih dari itu. Jilbab merupakan tanda kebanggaan terhadap ajaran Islam dan ilmu tauhid.

Pementasan ini dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah tanpa mengurangi eksistensi dari kedua hal tersebut, seperti dalam pementasan Lautan Jilbab. Emha Ainun sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia melalui pementasan Lautan Jilbab yang memadukan unsur keduanya. Perlawanan Emha Ainun terhadap kebijakan berjilbab masa Orde Baru menandai salah satu upaya penting dalam memperjuangkan hak-hak individu dan kebebasan beragama di Indonesia. Sikap berani Emha Ainun menjadi contoh penting bagaimana suara

individu dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan kebijakan yang lebih adil.

Pementasan ini dapat memperkuat gerakan sosial wanita Muslimah yang saat itu dianggap sebagai bentuk resistensi simbol terhadap pemerintahan Orde Baru. Karena besarnya pengaruh pementasan Lautan Jilbab, pemerintah Orde Baru bahkan melakukan pengawasan ketat terhadap pementasan drama ini, meskipun tidak berhasil membendung dukungan masyarakat yang semakin luas. Pada akhirnya perjuangan ini turut mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah Orde Baru. Dari adanya aksi protes sosial yang diterima pemerintah Orde Baru, perlahan kebijakan dari pemerintah mulai melunak. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 pada tanggal 16 Februari 1991 yang memperbolehkan kembali pemakaian jilbab. (Majalah Kompas, 1991)

Hal ini juga dipicu ketika sahabat terdekat Soeharto yaitu Jenderal Benny Moerdani seorang Menteri Pertahanan seorang Katolik yang juga merupakan Penglima Tentara Nasional Indonesia menasehatinya untuk memisahkan tanggungjawab resminya dari kepentingan bisnis, teman, dan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan korupsi. Sejak tahun 1988 terjadi ketegangan antara Soeharto dan Militer Indonesia. Soeharto sangat marah dengan saran yang dilontarkan Benny Moedarni kepadanya, namun sekaligus membuatnya sadar bahwa ia memerlukan bantuan dari kekuatan lain yang bisa menandingi militer. Pada tahun 1991 sikap Soeharto terhadap umat Islam berbanding terbalik dari sebelumnya. Ia menunjukkan

identitasnya sebagai seorang yang lebih islamis setelah melakukan perjalanan haji bersama Ibu Tien dan sanak keluarga ke Mekkah dan Madinah pada tanggal 17 Juni 1991. Soeharto juga mendukung politik Islam dan memberikan dukungan pada pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia pada tahun 1990 sebagai tempat para aktivis Islamis untuk menyalurkan aspirasi politik mereka.

Naik hajinya Soeharto kemudian mengubah kontelasi politik dan kebijakan negara. Kebijakan Soeharto yang dianggap anti-islam secara bertahap mulai menerima Islam. Aturan baru tentang seragam sekolah kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Fuad Hasan menawarkan pilihan '*Pakaian Khas*', meskipun tidak menyebutkan secara khusus kata jilbab, tetapi istilah yang digunakan yaitu '*Seragam Khas*'. Peraturan tersebut berisi "Para pelajar baik SMP dan SMA diperbolehkan memakai seragam khas" yang mana bentuk seragam khas yang dimaksud adalah rok panjang sampai mata kaki, baju lengan panjang, dan jilbab berwarna putih. Keluarnya kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi umat Islam khususnya siswi dan wanita Muslimah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Jilbab. Dari sini kemudian dimulainya ruang politik Islam yang semakin ekspresif. Soeharto menyambut baik gerakan politik Islam yang sebelumnya tidak disetujuinya. Di berbagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini memberikan inisiatif kepada politik Islam dan kaum Muslim untuk membuat peraturan-peraturan yang sejalan dengan syariat Islam. Semuanya dilakukan oleh

Soeharto demi kekuasaannya.(Andreas Harsono, 2023)

Pasca dikeluarkannya SK No. 100, peluang ekspresi berbagai kelompok Muslimah di Indonesia semakin berkembang. Islam dapat mengekspresikan dalam berbagai bidang baik politik, pendidikan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya jilbab dipandang sebagai bentuk oposisi politik, tapi kini jilbab semakin banyak dipakai para wanita Indonesia. Setiap individu dapat bertanggungjawab atas pakaiannya, termasuk boleh tidaknya berjilbab di tempat umum. Sebelum tahun 1990an hanya mereka yang berasal dari lingkungan pesantren, madrasah, dan organisasi Islam yang mengenakan busana Muslimah. Mereka menggunakan busana Muslimah dengan sebutan jilbab capstok, yaitu busana Muslimah wanita tradisional yang populer di kalangan pesantren, madrasah dan organisasi Islam. (Nur Ayatillah, 2010)

Ketika kesadaran berjilbab belum begitu tinggi dikalangan Muslimah Indonesia, Siti Hardiyanti Rukmana yang sering dikenal dengan Tutut Soeharto atau Mbak Tutut putri pertama Soeharto sudah mengenakan jilbab dan busana Muslimah sejak tahun 1989. Soeharto memberi pesan kepada anaknya agar jilbab dan busana Muslimah yang ia pakai bukan hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi Tutut diminta untuk menjalankan ajaran agama secara istiqomah dan tidak melepaskan jilbabnya.(Trends, n.d.)



Keterangan: Gaya Jilbab Mbak Tutut 1990an

Sumber: "Mendobrak Kultur Pesimis" (Majalah Tempo, 1990)

Di era 1990an gaya berjilbab Mbak Tutut pernah menjadi hits saat Lebaran dengan sebutan 'Kerudung Mbak Tutut'. Jilbab yang dipakai Mbak Tutut terbuat dari bahan kain tipis yang dibagian pinggirnya terdapat hiasan benang warna-warni atau benang emas yang di sulam. (Rosiana Haryanti & Inggried Dwi Wedhaswary, 2018) Jilbab yang biasanya dipakai terdiri dari dua bagian yaitu inner dan bagian jilbab luar terurai menutupi dada. Cara memakainya pun tidak terlalu sulit, namun poninya dibiarkan terlihat. Baik untuk acara formal maupun non formal. Selain itu, warna, motif, dan bahan jilbab yang dipakai pun beragam. Mbak Tutut juga memiliki gaya berpakaian yang khas yaitu memakai baju terusan yang di dominasi warna hitam. (Kumparan, 2019)

Langkah Mbak Tutut mengenakan jilbab dianggap memiliki dampak yang signifikan dalam mempopulerkan busana Muslimah di kalangan masyarakat luas, khususnya di kalangan elit yang mendorong perkembangan mode busana

Muslimah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya grup musik kasidah Nasida ria yang membawakan lagu kasidahnya dengan mengenakan kain panjang yang disampirkan di bahu sebagai jilbab dan kebaya dengan bawahan jarit. Pada tahun 1990an wanita Muslimah mengenakan blus atau tunik lengan panjang yang modis dengan bordir yang dipadukan dengan celana dan kaian panjang untuk penutup kepala. (Rosiana Haryanti & Inggried Dwi Wedhaswary, 2018)



Keterangan: Grup Kasidah Nasida ria 1990an

Sumber: <https://www.instagram.com/nasidariasemarang?igsh=emQzbpmpMndkZnB2> (Nasida ria Semarang, n.d.)

C. Kesimpulan

Munculnya SK No. 052 yang secara tidak langsung adanya unsur larangan berjilbab di Sekolah Negeri menimbulkan berbagai pertentangan di masyarakat, wanita Muslimah, dan kalangan pelajar putri yang ingin memakai jilbab ke sekolah. Keluarnya SK No. 052 didasari adanya keinginan pemerintah Orde Baru untuk membatasi ruang gerak Islam. Pada waktu itu, mereka menganggap maraknya pemakaian jilbab baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah sebagai wujud fisik dari gerakan politik Islam yang

bertentangan dengan pemerintah Orde Baru. Siswi yang pergi ke sekolah dengan memakai jilbab mendapatkan perlakuan diskriminatif serta ancaman akan dipindahkan ke Sekolah Swasta. Di tahun 1989 juga muncul propaganda 'Jilbab Beracun' yang membuat kasus jilbab ini semakin menasional. Munculnya propaganda ini, banyak dari kalangan wanita Muslimah yang akhirnya memilih untuk melepaskan jilbabnya.

Adanya keresahan ini, Emha Ainun seorang budayawan hadir untuk menyuarakan kegelisahannya melalui karya sastra yang ia ciptakan. Emha Ainun mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan karya-karyanya yang menjadi kajian setiap gagasan pemikiran, maupun kritik dari berbagai aspek kepada pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat. Pementasan Lautan Jilbab karya Emha Ainun tampil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan berjilbab ini. Tujuan pementasan Lautan Jilbab yaitu untuk mengkritisi ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap rakyat. Pementasan Lautan Jilbab merupakan bentuk protes yang efektif karena mampu menggabungkan elemen seni dan sastra untuk mengkomunikasikan pesan yang terkandung di dalamnya terkait hak asasi manusia dalam beragama. Dampak yang timbul dari pementasan Lautan Jilbab yang dilakukan di berbagai daerah dengan keluarnya SK No. 100/C/Kep/D/1991. Selain itu hadirnya Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) semakin mempopulerkan busana Muslimah di kalangan masyarakat luas khususnya di kalangan elit yang mendorong perkembangan mode busana Muslimah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba. (1996). *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*. Gema Insani Press.
- Alatas, A. (2021). *Karena Jilbab: Di Balik Larangan Jilbab Di Sekolah Negeri di Indonesia (1982-1991)* (1st ed.). Idea Publising.
- Andreas Harsono. (2023). *Kejawen, Presiden Soeharto dan Kebebasan Beragama*. Kolom Espos.id. <https://kolom.espos.id/kejawen-presiden-soeharto-dan-kebebasan-beragama-1582328/amp>
- Anthony Giddens. (2010). *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru* (Yogyakarta). Pustaka Pelajar.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Gagasan Kritis Dan Perlawanan Emha Ainun Terhadap Rezim Orde Baru 1980an-1990an*. 6.
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 52/C/Kep/D 82 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat. 52, 17.*
- Jo, H. (2018). *Jilbab Terlarang di Era Orde Baru: Ketika Memakai Jilbab Dianggap Sebagai Sikap Melawan Oleh Rezim Orde Baru*. <https://historia.id/kultur/articles/jilbab-terlarang-di-era-orde-baru-6k4Xn>
- Kumpanan. (2019). *Cerita Tutut Soeharto Tentang Gaya Berkrudungnya Yang Khas*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Ian L. Betts. (2006). *Jalan Sunyi Emha* (Toto Rahardjo (ed.); 1st ed.). Kompas Media Nusantara.
- Latief S. Nugraha. (2018). *Sepotong Dunia Emha*. OCTOPUS Publishing.
- M. Imadadun Rahmat. (2005). *Arus Baru*

- Radikal Islam, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia.* Erlangga.
- Majalah Editor. (1989). *Keresahan Kaum Putih* (4 November).
- Majalah Kompas. (1991). *Resmi Berlaku, Penggunaan Seragam Khas di Sekolah* (17 Februari).
- Majalah Media Dakwah. (1985). *Siswi Berjilbab Tersingkir Dari Sekolah Negeri.* Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Majalah Tempo. (1990). *Mendobrak Kultur Pesimis* (28 April). Tempo.
- Majalah Tempo. (1991a). *Samudra Cinta Kasih* (24 Agustus).
- Majalah Tempo. (1991b). *"Seragam Harus, Jilbab Boleh"* (19 Januari).
- Miriam Budihardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Gramedia Pustaka Utama.
- Moeflich Hasbullah. (2017). *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara: Kajian Sosiologi Sejarah Indonesia.* Kencana.
- Nadzib, A. (2023). *Drama Lautan Jilbab Cak Nun Jadi Awal Pembolehan Pemakaian Jilbab di Indonesia.* Espos.id NEWS. <https://news.espos.id/drama-lautan-jilbab-cak-nun-jadi-awal-pembolehan-pemakaian-jilbab-di-indonesia-1678602/amp>
- Nasida ria Semarang. (n.d.). *Nasidaria Semarang.* <https://www.instagram.com/nasidariasemarang?igsh=emQzbpmpmMndkZnB2>
- Nur Ayatillah. (2010). *Inspirasi Ide-ide Kreatif Untuk Modifikasi Busana Muslim/Muslimah Otodidak Murah dan Praktis.* Harmoni.
- Nuraeni, L., & Gumilar, S. (2021). *"Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru 1982-1991."* 18(2), 163–175. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v18i2>.
- Pos, J. (1991). *Christine Hakim di Lautan Jilbab Karya Cak Nun Digelar di Go Skate* (23 Juli). Jawa Pos.
- Pratama, R. K. (2019). *Lautan Jilbab sebagai Fenomena Kebudayaan.* 1–4. <https://www.caknun.com/2019/Lautan-Jilbab-Sebagai-Fenomena-Kebudayaan/>
- Rosiana Haryanti & Inggried Dwi Wedhaswary. (2018). *Pada Era 1990-an "Kerudung Mbak Tutut" Pernah Jadi Tren Saat Lebaran.* <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/06/05/101445720/pada-era-1990-an-kerudung-mbak-tutut-terjadi-tren-saat-lebaran>
- Rosyidi, F. I. (2021). *Kekangan Berjilbab Masa Orde Baru.* <https://geotimes.id/opini/kekangan-berjilbab-masa-orde-baru/>
- Sztompka, P. (2008). *Sosiologi Perubahan Sosial.* Prenada.
- Titian.id. (2024). *"Lautan Jilbab" Cak Nun Melawan Jilbab Orde Baru.* <https://titian.id/lautan-jilbab-cak-nun-melawan-larangan-jilbab-orde-baru/>
- Trends, T. (n.d.). *Kisah Mbak Tutut Pertama Kali Putuskan Berjilbab, Terungkap Reaksi Soeharto, Beri Pesan Bijak.* <https://trends.tribunnews.com/amp/2024/07/25/kisah-mbak-tutut-pertama-kali-putuskan-berhijab-terungkap-reaksi-soeharto-beri-pesan-bijak>
- Zuarnum, L. (2022). *Di Balik Jilbabmu: Pergulatan Ekspresi, Represi, dan Otoritas Diri.* <https://crs.ugm.ac.id/di-balik-jilbabmu-pergulatan-ekspresi-represi-dan-otoritas-diri/>